

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Persyaratan tanggung jawab membuat pemerintah meningkatkan kinerja Unit Kerja Regional (SKPD) untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Mardiasmo (2006) (Husna, 2013), Tekanan dari masyarakat yang tinggi terhadap tata pemerintahan yang benar telah membuat pemerintah pusat dan daerah untuk memikul tanggung jawab umum. tanggung jawab mampu dipahami menjadi suatu bentuk kewajiban untuk memperlihatkan keberhasilan atau kegagalan melaksanakan objek organisasi dalam mencapai tujuannya. Laporan keuangan mampu berkualitas tinggi menunjukkan bahwa pimpinan SKPD telah mendelegasikan kepadanya wewenang untuk melakukan tanggung jawab pengelolaan organisasi (Azlim et al., 2012). Bagi pemerintah daerah, penyusunan laporan keuangan yang berkualitas merupakan suatu keharusan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melukiskan keteraturan pengoprasian keuangan pemerintah daerah, termasuk taat pengelolaan serta ketaatan pada prinsip. Salah satu indikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintah (SAP) adalah pemangku kepentingan media (publik).

Dari perspektif masyarakat setempat, laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun oleh SAP dapat menjelaskan bagaimana pemerintah mengelola keuangan dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Standar-standar ini ditegaskan oleh Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pernyataan Konsep Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Tahun 1999 No. 71. Mengenai tujuan pelaporan keuangan, 1 menunjukkan bahwa akuntabilitas adalah dasar dari pelaporan keuangan pemerintah, dan fondasinya adalah hak publik untuk mengetahui pengumpulan dan penggunaan sumber daya dan hak untuk menerima interpretasi. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan bertanggung jawab, sehingga pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi tentang hasil pengelolaan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan informasi dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memiliki beberapa karakteristik kualitatif yang dipersyaratkan (Armando, 2013). Informasi dalam laporan keuangan pemerintah pusat dan

daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) harus memiliki empat karakteristik dasar sebagai berikut: relevan, andal, sebanding, dan dapat dipahami.

Laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang status keuangan, kinerja, dan perubahan status keuangan perusahaan, yang dapat membantu menentukan penggunaannya. Kualitas laporan keuangan tercermin dalam karakteristik kualitatif. Prasyarat normatif yang diperlukan agar pelaporan keuangan pemerintah mencapai kualitas yang diharapkan adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. dalam LKPD atau Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dinilai dari sebuah Otoritas (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan pada setiap tahun. bilamana BPK menyampaikan opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan (LKPD) pemerintahan daerah, maka data laporan keuangan entitas pemerintah daerah itu diberikan lalu dinyatakan secara wajar dan mempunyai kualitas baik. akan ada beberapa pendapat yang mana akan diberikan saat setelah pemeriksaan berupa: (WTP) atau Opini Wajar Tanpa Pengecualian, (WDP) atau Opini Wajar Dengan Pengecualian, (TP) Opini Tidak Wajar, dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau (TMP) Tidak Memberi Pendapat. Kepala SKPD dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Kepala SKPD melaksanakan pertanggungjawaban keuangan yang berurusan dengan integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang - undangan yang tercermin di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang akan dipertanggung jawabkan kepada bupati/ walikota/ gubernur. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jember salahsatu yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ( Siadari, 2013). Maka hal pertama yang sangat mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah adalah kualitas sumber daya manusia. Menurut Wahyono (2004) dalam (Roshanti, Sujana, & Sinarwati, 2014) menyatakan, dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai, menyangkut dua elemen pokok yaitu informasi yang dihasilkan serta sumber daya yang menghasilkannya.

Sumber daya manusia yang berkualitas juga dapat menguragi waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan mengerti apa yang akan dikerjakan dengan baik dan sesuai bidangnya sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka

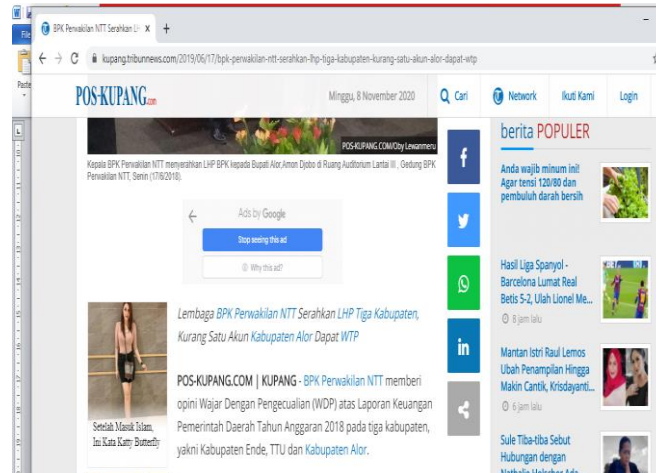
semakin baik untuk memilih keputusan(Roshanti, Sujana, & Sinarwati, 2014). dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk membuat sebuah Laporan Keuangan yang berkualitas. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk membuat Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas dibutuhkan SDM yang mengerti dan pandai dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Keberadaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan sesuatu yang berharga bagi organisasi itu sendiri. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. SDM akan bekerja secara maksimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat apa sebenarnya kompetensi mereka. Biasanya, pengembangan SDM berbasis kompetensi akan meningkatkan produktivitas karyawan sehingga kualitas kerja pun lebih tinggi pula dan berujung pada puasnya pelanggan dan organisasi akan diuntungkan. Pengembangan SDM berbasis kompetensi dilakukan agar dapat memberikan hasil sepadan dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Kompetensi yang dimiliki seorang karyawan secara individual harus dapat mendukung pelaksanaan visi misi organisasi melalui kinerja strategis organisasi tersebut. Oleh karena itu kinerja individu dalam organisasi merupakan jalan dalam meningkatkan produktivitas organisasi itu sendiri. Sedangkan Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia merupakan aset dalam segala aspek pengelolaan terutama yang menyangkut eksistensi organisasi.

Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson. 2000). Thompson, Higgins, Howell (1991), menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah pemrosesan, pengolahan, dan penyebaran data yang di dapat dari mengkombinasikan alat perangkat komputer dengan telekomunikasi. Untuk mengukur teknologi informasi dapat dilihat dari tingkat integrasi teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. yang ditandai dengan hal-hal berikut ini. Bagian akuntansi/keuangan memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas,Jaringan internet telah terpasang di unit kerja, Jaringan komputer telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan, Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi., Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundangundangan, Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi, Adanya jadwal

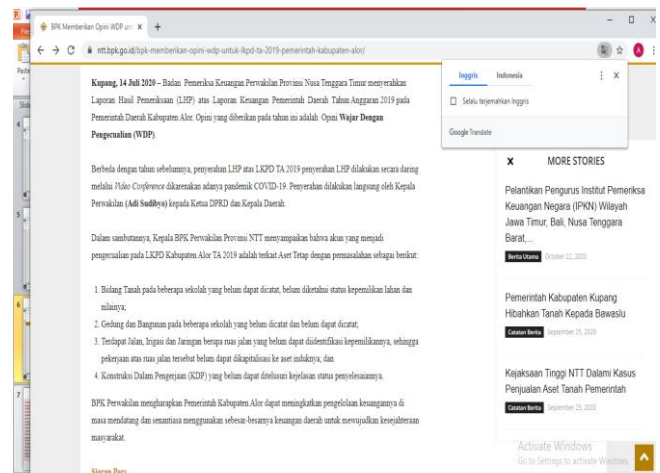
pemeliharaan peralatan secara teratur, dan Peralatan yang usang/rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya. berlandaskan Udiyanti, Atmaja dan Darmawan (2014) pada kesimpulan penelitian membuktikan jika kemampuan pegawai keuangan SDM tersebut mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada kualitas laporan keuangan. lalu, hasil penelitian Husna (2013) dber daya manusia pada penggunaan teknologi informasi tentang laporan keuangan regional. berdasarkan Handayani (2015) ekspansi teknologi informasi tidak, membuktikan bahwa jika tidak ada pengaruh signifikan terhadap kualitas sumliki pengaruh pada kualitas laporan keuangan daerah. Menurut Khalid (2016) Penggunaan teknologi informasi secara signifikan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.

Penulis ingin melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada pengaruh sdm dan teknologi informasi secara positif atau signifikan terhadap kualitas laporan , yakni laporan keuangan daerah. terkhususnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Alor \_NTT dimana mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). bahkan dua tahun terakhir ini masih mendapatkan opini (WDP).

## Tahun 2018



## Tahun 2019



## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1.2.1 Apakah Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah ?

1.2.2 Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah

1.3.2 Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

### **1.4.1 Bidang Teoritis**

Penelitian ini digunakan untuk memverifikasi teori yang ada. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi penelitian mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap laporan keuangan daerah sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian berikutnya

### **1.4.2 Bidang Praktis**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan atau kepada pihak yang terkait yaitu badan keuangan dan asset daerah kab.alor-ntt dan tambahan informasi mengenai pengaruh sdm dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap laporan keuangan